

**PENGARUH KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan



**DISUSUN OLEH  
ROSDIANA  
NIM : 01023120023**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

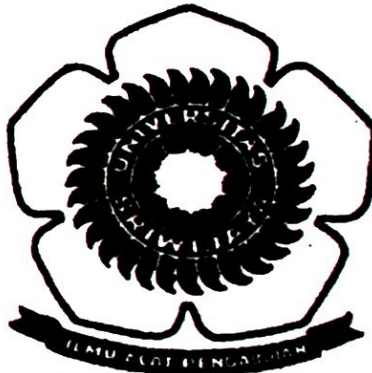
339.30 f  
Ros.  
p  
2006

**PENGARUH KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan



**DISUSUN OLEH**

**ROSDIANA**

**NIM : 01023120023**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

R.14462  
17824

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rosdiana  
NIM : 01023120023  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Mata Kuliah Pokok : Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  
Judul : Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang

Telah Disetujui Oleh Panitia Pembimbing Skripsi :

**Ketua Panitia**



**Drs. H. Tarmizi A. Rasyid**

**Anggota Panitia**



**Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, Msi**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah  
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang**

**OLEH  
ROSDIANA  
01023120023**

**Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 16 Agustus 2006  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF**

**KETUA PANITIA**



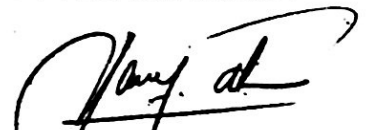
**Drs. H. Tarmizi.A.Rasyid  
Nip. 130365896**

**ANGGOTA PANITIA I**



**Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, Msi  
Nip. 131885904**

**ANGGOTA PANITIA II**



**Drs. Nazeli Adnan, Msi  
Nip. 131801648**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Ekonomi Pembangunan**



**Drs. Suhel, Msi  
Nip. 131993979**

**Motto :**

- ❖ *Kunci Keberhasilan dalam meraih kesuksesan adalah jujur dalam kebenaran, Sesungguhnya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. (Qs. Al-Baqarah : 147)*
  
- ❖ *Sesungguhnya Iman merupakan harta manusia yang paling kekal dan paling berharga, menjaga iman lebih penting dari menjaga harta.*
  
- ❖ *Menggapai suatu keberhasilan adalah dengan usaha dan upaya yang keras, bukan hanya menunggu keajaiban yang datang dari langit.*
  
- ❖ *Sebelum engkau tunjukkan siapa dirimu kepada dunia tunjukkanlah terlebih dahulu kepada orang terdekatmu yaitu orang tuamu, menjadi dirimu sendiri adalah pilihan terbaik.*

**Kupersembahkan Kepada :**

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta.*
- *Saudara-saudaraku tersayang.*
- *Teman-teman di Fakultas Ekonomi UNSRI.*
- *Almamaterku Tercinta.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya hingga selesainya penulisan skripsi dengan judul “ Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang “. Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Suhel, Msi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Bernadette Robiani, Msc selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Drs. H. Tarmizi A. Rasyid selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Sa'adah Yuliana, Msi selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
7. Bapak Drs. Nazeli Adnan, Msi selaku Anggota Panitia Pembimbing Skripsi penulis.
8. Seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Ayah dan Ibu Tercinta ( “ Bagai udara kasih yang engkau berikan, tak sanggup aku membalas. Banyak hal yang telah kalian korbankan demi anakmu ini, sembah sujudku padamu sampai akhir hayat “
11. Saudara-saudaraku tercinta : yuk Nani & k’ Ado’, adik-adikku : Irwan, Irvan, Icha serta keponakanku Dirra. Kalian semua adalah semangat hidupku, terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya selama ini.
12. Seluruh keluarga besarku, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjalin erat.
13. Darna & Tanto terima kasih banyak atas doa dan bantuannya selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian amin....
14. Daya, Abeng, Maryani, Vivid Zalbia ( Thanks atas doa, motivasi serta bantuannya selama ini.
15. Teman-temanku yang baik hati Dian DP, Nofri, Dora, Evi, Asma, Santi, Risky, Anita, Yeni.
16. Rida ( thanks atas semangat & Doanya). Aning, Robert, Sigit, Dani (Chayooo...!!!)
17. Seluruh Anak-anak Ep 02 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita semua menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa
18. Anak-anak Ep 00 – Ep 05, semoga sukses !!!
19. IKAMI ( Ikatan Mahasiswa / Pelajar Indonesia Sul-sel ), maju terus pantang mundur. Semangat !!!
20. Semua teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas dan nyata yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah antara lain untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah dan daerah secara bersama-sama mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari penerimaan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber penerimaan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penerimaan dari komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, laba kekayaan daerah, lain-lain PAD) kota Palembang terus mengalami peningkatan periode 1993-2004. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah



berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, maka penulis mengharapkan pendapat pembaca yang bersifat membangun bagi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukannya. Amin.

Inderalaya, Agustus 2006

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang periode 1993-2004. adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang serta Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini di dalamnya adalah komponen Pajak daerah, Retribusi Daerah, Laba Kekayaan Daerah serta Lain-Lain PAD yang Sah sebagai variabel independent, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel dependent. Variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa komponen Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang seperti yang ditunjukkan oleh  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel, sedangkan komponen pajak daerah dan laba kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang, seperti yang ditunjukkan oleh  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel.

## ABSTRACT

Generally the aim of research is to see the effect of the component Pendapatan Asli Daerah (PAD) to the growth of economic in Palembang city on 1993- 2004. The data which is used is the secondary data that is gotten from statistic center and DISPENDA in Palembang city.

The variable which is watched in research is the Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Kekayaan Daerah and Lain-lain PAD as an independent variable, while the growth of economic as dependent variable. The variable is analysed by using method double linear regression with program SPSS.

The result is the routine expanding component Retribusi Daerah and Lain-lain PAD does not have a significant influence to the growth of economic Palembang city as it is indicated by  $t\text{-statistic} < t\text{-table}$ , while the component Pajak Daerah and Laba Kekayaan Daerah has a significant influence to the growth of economic Palembang city, as it is indicated by  $t\text{-statistic} > t\text{-table}$ .

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
UCAPAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka.....	8
1.4.1 Landasan Teoritis.....	8



1.4.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	8
1.4.1.2	Pembangunan Ekonomi Daerah.....	11
1.4.1.3	Keuangan Daerah.....	13
1.4.1.4	Pendapatan Asli Daerah.....	16
1.4.2	Penelitian Sebelumnya.....	25
1.4.3	Hipotesis.....	26
1.5	Metodologi Penelitian.....	26
1.5.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	26
1.5.2	Jenis dan Sumber Data.....	27
1.5.3	Metode Analisis Data.....	27
1.5.4	Uji Hipotesis.....	28
1.5.5	Operasional Variabel.....	30

## **BAB II. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KOTA**

### **PALEMBANG**

2.1	Gambaran Umum Kota Palembang.....	33
2.1.1	Pemerintahan dan Wilayah Administrasi.....	33
2.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	35
2.2.1	Pajak Daerah.....	39
2.2.2	Retribusi Daerah.....	41
2.2.3	Hasil Kekayaan Daerah.....	45
2.2.4	Lain-lain PAD yang Sah.....	46

2.3 Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto..... 48

2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang..... 51

### **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1 Hasil Estimasi..... 53

3.2 Pembahasan..... 56

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan..... 68

4.2 Saran..... 69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Banyaknya kelurahan/Desa dan luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2004.....	34
<b>Tabel 2.2.</b> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	36
<b>Tabel 2.3.</b> Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	38
<b>Tabel 2.4.</b> Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	40
<b>Tabel 2.5.</b> Jenis-Jenis Retribusi Daerah Kota Palembang.....	41
<b>Tabel 2.6.</b> Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	43
<b>Tabel 2.7.</b> Pertumbuhan Laba Kekayaan Daerah Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	45
<b>Tabel 2.8.</b> Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	47
<b>Tabel 2.9.</b> Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	49
<b>Tabel 2.10.</b> Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	52
<b>Tabel 3.1.</b> Tabulasi Hubungan Pajak daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	58
<b>Tabel 3.2.</b> Tabulasi Hubungan Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	61
<b>Tabel 3.3.</b> Tabulasi Hubungan Laba BUMD dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	64
<b>Tabel 3.4.</b> Tabulasi Hubungan Lain-lain Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1993-2004.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. PDRB Kota Palembang atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
- Lampiran 2. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
- Lampiran 3. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang .
- Lampiran 4. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang
- Lampiran 5. Daftar Realisasi Penerimaan Laba Kekayaan Daerah Kota Palembang .
- Lampiran 6. Daftar Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Kota Palembang.
- Lampiran 7. Hasil Regresi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perkembangan politik, saat ini pemerintah memberlakukan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pemerintah kabupaten atau kota dan propinsi untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar (*local Discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat lokal (*local needs*).

Diberlakukannya otonomi daerah membawa akibat pada berkurangnya anggaran daerah yang berasal dari pemerintah pusat, namun disisi lain memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangannya secara langsung dan lebih leluasa.

Arsyad (1999:108) mengemukakan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Titik sentral dari otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Disamping tuntutan reformasi pemerintah, pengaruh perkembangan dan perubahan eksternal merupakan salah satu katalisator dalam pemberlakuan Undang-Undang ini. Perubahan eksternal tersebut dimaksudkan antara lain adalah adanya kecendrungan ekonomi global yang mengarah pada era perdagangan bebas dengan tingkat kompetisi yang tinggi di tengah-tengah kecepatan perubahan teknologi informasi yang dirasakan akhir-akhir ini.

Untuk menyelaraskan dengan pola pembangunan nasional, antisipasi terhadap diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 maka pemerintah daerah provinsi Sumatera

Selatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Pemekaran wilayah ini membawa konsekuensi pada tersebarnya Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya sumber-sumber keuangan daerah. Dengan kata lain membawa akibat terbaginya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, besar kecilnya mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin tinggi kemampuan daerah membiayai kegiatannya, sehingga lambat laun apa yang diharapkan agar daerah mampu membiayai kegiatannya sendiri dapat terwujud.

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satunya adalah kemampuan dibidang keuangan. Sebagai faktor esensial, maka kondisi keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk serta arah kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bila membandingkan potensi penerimaan daerah yang satu dengan yang lain dalam suatu wilayah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang potensi penerimaannya besar dan ada pula yang kecil, hal ini wajar karena bagi suatu negara yang mempunyai wilayah luas dengan latar belakang sejarah dan konfigurasi geografis seperti

Indonesia sangatlah wajar dijumpai ketimpangan pembangunan antar daerah.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Daerah Otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pemikiran sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Palembang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup tinggi, dimana Pendapatan regional perkapita kota Palembang Tahun 1995-2004 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004 pendapatan perkapita kota Palembang sebesar Rp 7.339.978 artinya rata-rata pendapatan penduduk per tahunnya sebesar Rp 7.339.978. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan migas kota Palembang tahun 2004 sebesar Rp 12.287.420 juta atau meningkat sekitar 6,58 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 11.528.800 juta. Sedangkan tanpa migas Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang atas dasar harga konstan pada tahun 2004 sebesar

Rp 10.218.275 juta atau naik 7,40 persen dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 9.514.054 juta. Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yaitu tahun 2003 sebesar Rp 67.151.817.006,65 menjadi Rp 66.812.272.044,50 pada tahun 2004 atau mengalami penurunan sebesar 0,5 persen. Jika dilihat untuk setiap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti penerimaan dari pajak daerah, pada tahun 2003 sebesar Rp 26.036.154.076,25 menjadi Rp 31.903.200.332,50 pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebesar 18,39 persen. Komponen retribusi daerah naik dari tahun 2003 yang sebesar Rp 25.418.742.848,00 menjadi Rp 28.348.128.326,00 pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 10,33 persen. Untuk penerimaan dari Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turun dari tahun 2003 sebesar 1.077.405.243,00 menjadi Rp 1.000.000.000 pada tahun 2004, atau turun sebesar 7,18 persen. Dan untuk penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2003 sebesar Rp 14.619.514.839,40 menjadi Rp 6.560.943.386,00 pada tahun 2004 atau mengalami penurunan sebesar 55,12 persen.

Dengan melihat besarnya sumbangan dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Asli Daerah, maka usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat berjalan dengan baik tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan dari sumber penerimaan dari masing-masing komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dimana dalam pasal 157 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber atau komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari: 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, tidak akan terlepas dari penerimaan atau pendapatan daerah. Dimana untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan atau pendanaan yang sangat besar.

Dana-dana tersebut diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan PAD diharapkan akan semakin meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu dibutuhkan usaha-usaha yang tepat agar potensi tersebut dapat dikembangkan.

Hal ini berarti pemerintah daerah dapat menggali segala sumber-sumber potensi keuangannya melalui komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan meningkatnya penerimaan dari PAD, diharapkan akan mampu membiayai kegiatan pemerintah dalam usaha menunjang pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Dengan kata lain bahwa semakin baik pengelolaan terhadap masing-masing komponen PAD, maka akan semakin tinggi kemampuan daerah

dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam usaha meningkatkan laju pembangunan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “ *Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang*”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang ingin dikemukakan penulis adalah “ *Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang* “

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- Secara Akademis: sebagai bahan kajian dan informasi oleh pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh

mengenai pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi.

- Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan untuk mengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang dipergunakan untuk pengembangan prospek komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khususnya di kota Palembang.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1 Landasan Teoritis**

#### **1.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Didasarkan pada kenyataan bahwa pada suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten/kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama antara lain :

- Sumber daya alam yang tersedia.
- Tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam.
- Adanya sarana dan prasarana yang menunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain.
- Tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam.



- Tersedianya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan teknologi.

Faktor-faktor tersebut di atas secara langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan. Tingginya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan daerah merupakan cerminan keberhasilan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan model neo klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dan dijelaskan oleh Richardson (1978). Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Berdasarkan model Neo-Klasik, terdapat tiga faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu : 1) Kemajuan teknologi, 2) Penambahan modal (investasi), 3) Penambahan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Menurut Budiono (1985:23) pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, yaitu harus memperhatikan output total (GDP) dan jumlah penduduk. Ini berarti sasaran utama pertumbuhan

ekonomi adalah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan output tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain : 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya, 2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, 3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi, 4) Sistem sosial dan sikap masyarakat, 5) luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Sedangkan menurut Kuznets, dalam Todaro (1983:181) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Ada tiga komponen yang menjadi penentu terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu : ( Todaro : 182 )

- a. Kenaikan output secara berkesinambungan dan adanya kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang sebagai tanda kematangan ekonomi suatu Negara.
- b. Perkembangan teknologi yang merupakan dasar atau pra kondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi dengan dukungan faktor-faktor lain.
- c. Penyesuaian dalam kelembagaan, sikap dan ideologi serta terjadinya inovasi teknologi tanpa dibarengi oleh inovasi sosial.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tercapai apabila didukung oleh perkembangan teknologi, penyesuaian institusional, kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan masyarakatnya dan ideologis negara yang bersangkutan.

Mekanisme perekonomian dengan pengertian investasi lebih banyak diarahkan kepada usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterangkan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar yang lebih dikenal dengan Model Pertumbuhan Harrod – Domar. Teori Harrod – Domar ini yang memberikan arti penting investasi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock kapital. ( Todaro, 1977:65 )

#### 1.4.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999:107), daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan

sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) kedalam wilayah daerah tersebut (Arsyad, 1999:108)

Salah satu indikator pembangunan ekonomi daerah adalah biasa diukur dengan pendapatan regional perkapita atau PDRB perkapita. Namun tolak ukur pendapatan regional perkapita atau PDRB perkapita disadari belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan. Pada hakikatnya pendapatan regional atau PDRB perkapita sama sekali tidak memberikan indikasi atau petunjuk sesungguhnya, bagaimana pendapatan regional

disebuah daerah dibagikan kepada penduduknya secara keseluruhan, sehingga unsur pemerataan tidak dapat dipantau (Todaro, 2000:181).

#### 1.4.1.3. Keuangan Daerah

Untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam berpartisipasi pada program-program pembangunan, maka perlu dilihat dari aspek keuangannya. Menurut Jaya (1999) dalam Munir (2004:25), keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah (1995) dalam Munir (2004:26), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Posisi keuangan sangat penting dalam pembangunan daerah sehingga dibutuhkan suatu kebijakan keuangan daerah yang efektif.

Kebijaksanaan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek, yaitu:

- Pembiayaan dalam rangka azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Sumber pendapatan asli daerah.
- Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelolah keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Pembangunan nasional tidak akan luput dari pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan sumbangan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional maka pembangunan pusat maupun pembangunan daerah perlu mengadakan usaha untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Ada perbedaan penting diantara perekonomian daerah dengan perekonomian nasional yang menyebabkan perekonomian daerah dalam strategi dan usaha-usaha untuk menciptakan pembangunan daerah menjadi berbeda dengan yang dilakukan dengan pemerintah pusat. Dimana secara garis besar perbedaan tersebut dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :  
Sukirno ( 1985 : 105 )

- a. Perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh kenyataan bahwa suatu perekonomian daerah adalah lebih terbuka dari perekonomian nasional, karena mobilitas dari faktor-faktor produksi dan kegiatan

perdagangan di antar daerah tersebut dengan daerah lainnya dalam satu negara, adalah lebih bebas dari yang terjadi antar negara.

- b. Perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh terbatasnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai tindakannya.

Menurut Davey dalam Syamsi (1994), menegaskan bahwa ada tiga pendekatan nasional dalam melihat hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yaitu :

- a. Pendekatan kapitalis (*Capitalization approach*). Pendekatan ini berdasarkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang keuangan atas dasar “ kuasi komersial” dimana pemerintah pusat mengadakan investasi dengan pemerintah daerah.
- b. Pendekatan belanja (*Expenditures approach*). Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya, yaitu biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah.
- c. Pendekatan komprehensif (*comprehensive approach*). Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelolah sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja.

Dalam penyusunan PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pendekatan yang dilakukan adalah menginventarisasi kewenangan-kewenangan yang

masih perlu dimiliki pemerintah pusat dan propinsi dalam rangka kedaulatan dan keutuhan Negara Republik Indonesia agar tercapai suatu sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota tanpa melupakan esensi utama dari otonomi daerah yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui deregulasi dan debirokrasi di segala bidang.

#### 1.4.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 5 ayat (4), disebutkan bahwa daerah otonomi dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Jika diperjelas bunyi pasal 5 ayat (4) di atas, maka syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suatu daerah otonomi adalah : 1) Kemampuan ekonomi. 2) Jumlah Penduduk. 3) Luas daerah. 4) Pertahanan dan keamanan nasional.

Dari keempat faktor di atas, maka kemampuan ekonomi adalah faktor yang paling menentukan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Karena tanpa adanya faktor ini, tidak akan mungkin suatu daerah menjadi otonom. Kemampuan ekonomi ini adalah kemampuan daerah untuk menjadi mandiri secara ekonomi, yaitu adanya faktor-faktor yang menjadikan daerah yang



bersangkutan mempunyai sumber-sumber keuangan yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, suatu daerah yang otonom perlu memperhatikan unsur-unsur berikut : ( Mardiasmo, 2000: 86)

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatannya sendiri.
- c. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber mumi dari daerah untuk mempercepat tercapainya kemandirian daerah dibidang pendanaan, maka pemerintah daerah terus meningkatkan kemampuannya agar semakin dapat mengusahakan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sesuai dengan keadaan dan potensi perekonomian yang ada di daerah masing-masing.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi pembiayaan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah, pemerintah harus mempertinggi pengeluaran pembangunan pemerintah yang berarti pemerintah harus memperbesar dana pembangunan yang dapat digunakannya. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan mengelola Pendapatan Asli Daerah secara optimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

- 1) Hasil pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari keempat sumber PAD di atas, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah, sebagai factor penunjang untuk melaksanakan kewajiban daerah agar lebih dapat mandiri.

#### **a. Hasil Pajak daerah**

Pajak menurut Sumitro (1979:23) ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik, untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pada hakekatnya pengertian pajak daerah tidak terdapat perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip hukumnya, misalnya mengenai

subjek hukum dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungutan dan pengenaan pajak.

Ciri-ciri pajak daerah dapat diiktisarkan sebagai berikut :

- Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik.

Dalam pembagian lainnya pajak dapat pula dibedakan ke dalam tiga sistem pemungutannya, yaitu : ( Mardiasmo, 2001: 10 )

- Pajak Progresif adalah persentase beban pemungutan pajak yang dipungut dengan tarif persentase meningkat apabila pendapatan meningkat.
- Pajak proporsional adalah persentase beban pemungutan pajak yang sama untuk semua tingkat pendapatan.
- Pajak Regresif adalah persentase beban pemungutan pajak yang semakin menurun bila pendapatan meningkat.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000, pasal 2 yang menjadi pajak daerah untuk pemerintah kabupaten/kota ialah :

a. Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran.

Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak Reklame.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Untuk pajak daerah ini dalam hal pemungutan diberikan wewenang kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Hasil Retribusi Daerah**

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari masyarakat merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri untuk memenuhinya. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui perihal retribusi baik mengenai tata cara pembayaran retribusi, hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut M. Suparmoko (2001:85) retribusi daerah adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Bagi retribusi berlaku asas pengecualian (*exclusion principle*) yaitu bagi yang tidak menikmati jasa dan atau barang-barang pemerintah dikecualikan dari pungutan tersebut. Ciri-ciri pokok retribusi yaitu :  
(Josef Riwu Kahu, 1997:152)

- Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.
- Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- Adanya kontra Prestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.

- Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara atau pemerintah.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.12 tahun 1957, agar pemungutan retribusi daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka retribusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan retribusi harus adil (syarat keadilan).
- 2) Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- 4) Sistem pemungutan retribusi harus sederhana.
- 5) Retribusi yang dipungut harus elastis.

Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 pasal 24 tentang penetapan tarif dan retribusi daerah antara lain :

- Retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Peraturan daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut.
- Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
  - a) Nama, objek, dan subjek retribusi.
  - b) Golongan Retribusi.
  - c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
  - d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi stuktur.
  - e) Struktur dan besarnya tariff retribusi.
  - f) Wilayah pemungutan.



- g) Sanksi administrative.
- h) Tata cara pemungutan.
- i) Tata cara pengawasan.
- j) Tanggal mulai berlakunya.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan (BUMD)**

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 1999 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa perusahaan daerah adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah hasil atau penghasilan daerah. Hasil perusahaan daerah adalah bagian dari keuntungan serta laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 1999 yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, misal bank pemerintah daerah, pasar, perusahaan daerah air minum (PDAM) dan lain-lain. Sejalan dengan itu perusahaan daerah harus didasarkan atas asas-asas ekonomi. Perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu perusahaan daerah juga bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional.



#### **d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Sumber ini adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan diluar pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD. Yang termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain PAD yang sah ialah usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipergunakan masyarakat, usaha daerah dalam bentuk kegiatan yang bersifat insidental. Sumber penerimaan Lain-lain PAD yang sah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dinas-dinas daerah dan penerimaan lain-lain. Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, retribusi ataupun laba perusahaan daerah. Yang termasuk penerimaan lain-lain diantaranya adalah penerimaan dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang bekas milik daerah, dan penerimaan sewa kas milik daerah. Sumber penerimaan ini diatur dalam pasal 60 Undang-undang No.5 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa sebagai sumber pendapatan daerah, penerimaan lain-lain diatur dengan peraturan daerah.

#### **1.4.2 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kotamadya Dati II Jambi oleh Kurnia (1998) menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan

ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah, dimana dengan peningkatan PAD dan alokasi dana PAD pada anggaran pengeluaran pembangunan diikuti pula oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Labet (2005) tentang peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan perekonomian kota Palembang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang positif terhadap perkembangan ekonomi kota Palembang.

### **1.4.3 Hipotesis**

Dalam penulisan ini, dikemukakan hipotesis bahwa:

- Diduga pajak daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Diduga retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain terhadap pertumbuhan ekonomi kota Palembang periode 1993-2004.

### 1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka di instansi pemerintah seperti ke kantor Biro Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan perpustakaan-perpustakaan. Data sekunder tersebut berdasarkan rentang waktu (*time series*) yang meliputi data perkembangan PAD kota Palembang Tahun 1993 – 2004 serta data perkembangan PDRB kota Palembang Tahun 1993 – 2004.

### 1.5.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif (kualitatif) dan kuantitatif. Metode deskriptif berguna untuk menjelaskan keadaan, masalah, sedangkan metode analisis kuantitatif berguna untuk menjawab atau menguji hipotesis.

Hipotesis tersebut dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, yaitu untuk melihat pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 + e$$

Dimana :

$$Y = \text{Pertumbuhan Ekonomi kota Palembang}$$

$X_1$	=	Pajak Daerah
$X_2$	=	Retribusi Daerah
$X_3$	=	Bagi Laba Usaha
$X_4$	=	Lain-lain pendapatan Asli Daerah
$\alpha_0$	=	Konstanta
$\alpha_i$	=	Koefisien regresi, dengan $i = 1, 2, 3$ dan $4$
$e$	=	Standar Error

#### 1.5.4 Uji Hipotesis

Terhadap hasil regresi dilakukan uji hipotesis untuk menguji parameter yang berhasil diduga sebagai petunjuk keberartian dari nilai-nilai yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan uji statistik yang meliputi :

##### a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) secara parsial dengan rumus :

$$T_h = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Dimana :  $T_h = t - \text{hitung}$

$b_i = \text{Koefisien regresi ke } i$

$Se = \text{Standart Error koefisien regresi ke } i$

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

Jika nilai absolut  $t - \text{hitung}$  lebih kecil dari pada nilai  $t - \text{tabel}$  berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu, maka hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independennya adalah tidak nyata atau tidak signifikan. Sebaliknya jika nilai absolut  $t - \text{hitung}$  lebih

besar dari pada nilai t – tabel berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu, maka hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independennnya adalah nyata atau signifikan. ( Anto Dajan 1986:157 )

#### b. Uji F

Untuk membuktikan bahwa koefisien regresi suatu model regresi secara keseluruhan (simultan) adalah signifikan secara statistik, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F statistik dengan rumus :

$$F_h = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :  $F_h$  = F hitung  
n = Jumlah sampel  
k = Jumlah variabel independent

Jika nilai absolut F – hitung lebih kecil dari F – tabel berdasarkan suatu tingkat kepercayaan tertentu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara variabel independen dengan variabel dependen atau tidak signifikan. Sebaliknya jika nilai absolut F – hitung lebih besar dari F – tabel berdasarkan suatu tingkat kepercayaan 95 %, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan nyata antara variabel independen dengan variabel dependen atau signifikan. (Anto Dajan 1986:158 )

### c. Uji $R^2$

Untuk melihat dan mengetahui besarnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan analisis varian dengan perhitungan koefisien determinasi dengan formula sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\Sigma (X_i Y_i)}{\Sigma X_i^2 \Sigma Y_i^2}$$

Dimana :  $R^2$  = Koefisien determinasi  
Y = Variabel dependen  
X = Variabel independen

Nilai  $R^2$  ini menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Kemudian untuk melihat keceratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dilakukan dengan mengambil akar dari  $R^2$  sehingga didapat nilai R yang semakin mendekati 1 menandakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen semakin erat.

#### 1.5.5 Operasional Variabel

Untuk memudahkan di dalam menganalisis variabel-variabel yang diteliti dalam tulisan ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan pengertian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Batasan-batasan tersebut antara lain:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya di kota Palembang periode 1993-2004.

- **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran oleh masyarakat kepada pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah dimana kontrapretasinya tidak diperoleh secara langsung, berdasarkan peraturan perundang-undangan di kota Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan data realisasi pajak daerah dari tahun 1993-2004.

- **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat bagi konsumen yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan pemerintah daerah kota Palembang periode 1993-2004.

- **Bagi Laba Usaha Daerah (BUMD)**

Bagi Laba Usaha Daerah adalah penerimaan yang berasal dari BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah kota Palembang periode 1993-2004.

- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan di luar pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD. Dalam penelitian ini menggunakan data realisasi lain-lain PAD yang sah serta pertumbuhannya dari tahun 1993-2004.

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat yang diukur dalam satuan persentase berdasarkan harga konstan, dalam hal ini di lihat dari perkembangan PDRB dari tahun 1993-2004.

- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Regional Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah (nilai akhir) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (unit ekonomi) di Palembang dalam satu tahun periode 1993-2004.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-4*. Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2004. *Palembang Dalam Angka*.
- Budiono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Dajan, Anto, 1986. *Pengantar Metode Statistik*. LP3ES. Jakarta.
- Davey, k.j, 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Parktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Penerjemah Amanullah dkk. UI Press. Jakarta.
- Dispenda Kota Palembang, *Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang*, 1993-2004.
- Kaho Riwu, J, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kurnia, Rahmat, 1998. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan PAD Kota Jambi*. Fakultas Ekonomii UNJA.
- Labet, 2004. *Peranan PAD Terhadap Perekonomian Kota Palembang*. FE Universitas Sriwijaya.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan Edisi Revis.*, Andi Offset. Yogyakarta.
- Munir, H. Dasril, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Yogyakarta.
- Novianty, 2005. *Analisis Potensi Penerimaan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan otonomi Daerah di Kota Palembang*. FE Universitas Sriwijaya.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.

Sumitro, Rachmat, 1979. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*. Eresco. Jakarta.

Suparmoko, M,2001. *Keuangan Negara*. BPFE. Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu, 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara Edisi ke-3*. Rineka. Jakarta.

Todaro, Michael, 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke III, Jilid 1*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

Republik Indonesia, 2000. *Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 Tentang Pajak dan retribusi Daerah*. Departemen Dalam Negeri . Jakarta.